

MINDERE WELVAART COMMISSION DAN PERSOALAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX

Rifai Shodiq Fathoni

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret

rifai.sf@gmail.com

ABSTRACT

This study delves into the role played by the Mindere Welvaart Commission in addressing welfare concerns within the Dutch East Indies. Employing the historical method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, the study examines the commission's formation and its impact. Findings indicate that the colonial government established the Mindere Welvaart Commission in response to pressure to address the welfare of the indigenous population. While the commission effectively investigated the economic and social issues facing the population, it faced controversy and criticism. Some contemporary figures argued that the commission was formed to delay immediate improvements, while others questioned the accuracy of the presented data.

Keywords: *Mindere Welvaart; Policy; Ethical Politics; Modernization.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi Mindere Welvaart dalam memetakan permasalahan kesejahteraan di Hindia-Belanda. Persoalan kesejahteraan penduduk koloni menjadi topik hangat di Belanda sejak akhir abad ke-19. Setelah bertahun-tahun melakukan eksploitasi di tanah koloni, pemerintah Belanda mulai mendapat desakan untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk. Kala itu, kehidupan penduduk Hindia-Belanda, khususnya kalangan bumiputera, memang memprihatinkan. Periode liberal yang dipandang lebih baik daripada periode *cultuurstelsel*, nyatanya tidak banyak berpengaruh pada penduduk bumiputera.

Pembukaan pintu aliran modal pada periode liberal memang merangsang pertumbuhan ekonomi para pengusaha. Keuntungan selama tanam paksa pun dapat dilanjutkan untuk beberapa waktu, tetapi kebebasan pada periode tidak dapat dinikmati oleh penduduk bumiputera. Tatkala para pengusaha Eropa dapat memaksimalkan terbukanya pintu pasar modal dengan membangun berbagai jenis pabrik, penduduk bumiputera justru tidak dapat

bereaksi terhadap insentif yang ditawarkan. Akibatnya, kemiskinan pun tetap menghantui mayoritas penduduk bumiputra saat itu.¹

J. S. Furnivall dalam karyanya “Netherlands India: A Study of Plural Economy”, menjelaskan bahwa kemajuan yang tercipta pada periode ini lebih banyak disebabkan oleh kehadiran perusahaan-perusahaan besar bukan perusahaan individu. Pada akhirnya, kemajuan ini mengorbankan penduduk asli sebagai individu yang tidak berdaya menghadapi gempuran kekuatan modal dan biaya-biaya produksi.²

Sejalan dengan kondisi yang semakin memperihatinkan, suara-suara yang menuntut perubahan dan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk Hindia-Belanda semakin lantang terdengar memasuki paruh kedua abad ke-19. Menurut Abraham Kuyper, pada akhir abad ke-19, partai-partai di parlemen Belanda mulai melunakkan sikapnya dan tidak lagi menyangkal kewajiban moral di tanah koloni. Hanya saja belum ada kesepakatan lebih lanjut mengenai solusi untuk Hindia-Belanda.³

Desakan juga disuarakan oleh C. T. van Deventer⁴ dalam tulisannya berjudul “Eereschuld” (Hutang Kehormatan). Dirinya yang terinspirasi dari karangan Multatuli menyerukan sudah saatnya Belanda memenuhi kewajibannya di tanah koloni dengan membayar “hutang kehormatan” sebesar 190 juta gulden. Selain menyoroti buruknya tingkat kesejahteraan penduduk Hindia-Belanda, ia juga menyoroti minimnya sarana pendidikan di tanah koloni, Deventer mencatat hanya terdapat empat sekolah yang menyediakan pendidikan lebih dari SD.

Berbagai desakan ini akhirnya memaksa pemerintah Belanda untuk memutar otak mencari solusi. Masalah kesejahteraan menjadi salah satu landasan dalam pengambilan kebijakan pada abad ke-20. Bisa dibbilang hampir seluruh kebijakan yang muncul pada masa politik etis didasarkan pada masalah ini. Pada periode Mindere Welvaart hadir sebagai ujung tombak pemerintah kolonial untuk memetakan permasalahan penduduk.

¹ G. H. A. Prince. “Kebijakan Ekonomi di Indonesia, 1900-1942”, dalam J. T. Linbald (Eds.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 235.

² J. S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), hlm. 222.

³ A. Kuyper, *A. Eenige Kameradviezen Uit de Jaren 1874 En 1875* (Amsterdam: J. A. Wormser, 1890), hlm. 37-38.

⁴ C. T. van Deventer “Een Eereschuld” dalam G. J. A. Beijerinck (Ed.), *De gids: nieuwe vaderlandsche letteroefeningen*, Volume 63 (Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1899), hlm. 205-252.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian sejarah yang mencakup pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik terhadap sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Penulis lebih banyak menggunakan sumber tertulis, baik sumber primer atau sekunder, dengan pertimbangan periode tahun penelitian yang terlalu lampau. Untuk sumber tertulis, ada beberapa sumber primer yang berhasil dihimpun. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai lokasi.

Beberapa sumber primer yang digunakan seperti *Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Va; IXa; Xc; Volkstelling 1930*, Departement van Economische Zaken; *De Ethische richting in de Nederlandsch-Indische politiek*; *Ontwerp-Program voor de Nederlandsche Koloniale Politiek*; *Over de opleiding tot controleur bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië*; diperoleh dari Delpher, ANRI, dan Perpustakaan Nasional di Republik Indonesia. Sumber-sumber primer itu kemudian ditunjang oleh berita-berita di surat kabar atau majalan sezaman seperti *Het Nieuws van Den Dag*, *De Preanger Bode*, *De Locomotief*, *De Telegraaf*, *De Indische Courant*, *Soerabaiasch-Handesblad*.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Mindere Welvaart Commision

Desakan untuk memperbaiki nasib penduduk Hindia-Belanda terus muncul memasuki abad ke-20. Di *Staten General*, H. H. van Kol, anggota Partai Sosial Demokrat, turut mengemukakan gagasan untuk memperbaiki nasib bumiputra melalui tulisannya berjudul “Ontwerpprogram voor de Nederlandsche koloniale politiek.” Di tulisan tersebut dipaparkan sembilan program untuk memperbaiki nasib penduduk bumiputra yang meliputi kemerdekaan bersuara, keadilan yang merata, perbaikan irigasi, peningkatan kesehatan, dan pemisahan administrasi Hindia-Belanda dengan negara induk (otonomi untuk Hindia-Belanda). Program-program yang diutarakan Kol tersebut memiliki tujuan utama mengembangkan mental, fisik, dan moral penduduk bumiputra.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ H. van Kol, *Ontwerp-Program voor de Nederlandsche Koloniale Politiek* (Amsterdam: Uitgever J. A. Fortuijn), hlm. 3-4.

Setelah didesak berbagai pihak, jalan terang pun mulai terlihat setelah pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina, dalam pidato kerajaan (*troonrede*) menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi penduduk bumiputra di tanah koloni. Ia juga menegaskan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral di tanah koloni. Boeke berpendapat bahwa politik etis memang difokuskan untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi penduduk bumiputra. Tanggung jawab pemerintah kolonial tidak hanya terhadap pengembangan perusahaan swasta seperti periode sebelumnya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap kepentingan penduduk bumiputra.⁷

Dalam rapat anggaran Hindia-Belanda tahun 1902, Menteri Urusan Tanah Jajahan kembali mengangkat topik tentang kesejahteraan penduduk bumiputra yang memprihatinkan. Mereka tidak hanya lemah ekonominya, tetapi juga harus menderita karena kelangkaan pangan. Akhirnya, rapat itu menyimpulkan bahwa kesejahteraan di Hindia-Belanda masih sangatlah rendah dan oleh sebab itu sudah seharusnya pemerintah kolonial harus berusaha memperbaikinya. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kolonial mengeluarkan keputusan 15 Oktober 1902 untuk menyelidiki penyebab rendahnya kesejahteraan penduduk Jawa dan Madura, kecuali wilayah *Vorstenlanden* dan tanah-tanah pribadi. Sebuah komite pusat (*Mindere Welvaart Commissie*) dibentuk di bawah pimpinan Residen Pekalongan, H. E. Steinmetz.⁸

Tugas pertama komisi ini adalah menyusun pedoman penyelidikan kesejahteraan penduduk. Penyusunan pedoman itu membutuhkan waktu satu tahun untuk selesai. Pedoman tersebut berisi 533 pertanyaan yang selanjutnya dilimpahkan kepada komite di setiap kabupaten. Untuk pengolahan data yang dikumpulkan dari laporan setiap wilayah dilakukan langsung oleh komisi pusat.⁹ Penyelidikan dimulai pada 1 Juli 1904 dan memakan waktu selama 12 bulan. Sebanyak 594 peneliti diterjunkan untuk mendapatkan data ekonomi dan sosial hampir di tiap wilayah Hindia-Belanda.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh komisi ini bisa dikatakan penelitian yang masif dan ambisius. Bahkan untuk merampungkan seluruh publikasi

⁷ Boeke, *De Etische richting in de Nederlandsch-Indische politiek*”, dalam *De Gids*, 1940, hlm. 25-26.

⁸ *Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera*, Vol. XVII).

⁹ L. P. van der Does. “Sociaal onderzoek in Indonesië.” *Mens en Maatschappij*, Vol. 23, 1948, hlm. 260.

¹⁰ *Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera*, Vol. Xc.

sebanyak 33 volume dibutuhkan waktu hampir sepuluh tahun dan baru selesai pada tahun 1914.¹¹

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan survei sebenarnya telah diperkirakan sebelumnya. Snouck Hurgronje yang pernah menolak ketika diminta bergabung secara terang-terangan mengkritik komisi tersebut. Ia berpendapat tidak ada gunanya menarik kesimpulan umum tentang kondisi ekonomi karena daerah yang begitu banyak dan masalah yang dihadapi berbeda-beda. Sementara itu data yang dibutuhkan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di arsip karisidenan. Durasi kerja yang lama juga dianggap tidak efisien, karena data-data yang dipaparkan pada akhirnya tidak aktual atau kadaluwarsa. Menurutnya pembentukan komisi itu dianggap hanya membuang biaya, waktu dan tenaga.¹²

Sebagian ahli kala itu menilai investigasi yang dilakukan oleh Mindere Welvaart Commisie tidak terlalu penting karena hanya menjadi sarana untuk menunda perbaikan yang mendesak. Pemerintah kolonial yang notabene sebagai penyelenggara memang tampak kurang antusias, bahkan sering kali menolak saat dimintai dokumen yang dibutuhkan oleh komisi kesejahteraan.¹³ Selain itu, kinerja para peneliti juga menuai sorotan. Sejak awal mereka dipandang kurang antusias dalam melakukan investigasi. Para pegawai pemerintahan dalam negeri yang seharusnya menjadi ujung tombak investigasi juga dipandang tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk proyek ini. Pandangan yang sama juga diutarakan oleh ketua komisi, H. E. Steinmetz. Dalam tulisannya berjudul “Over de opleiding tot controleur bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië” (1889), ia menyampaikan perlunya peningkatan kualitas pegawai pemerintah dalam negeri.

Meskipun komisi ini menuai berbagai kritik, penyelidikan terkait kesejahteraan penduduk tetap dilanjutkan. Terlepas dari aktual atau tidaknya data yang dipaparkan, hasil penelitian komisi ini memberikan sumbangan penting bagi penelitian sosiografis selanjutnya. Investigasi tidak hanya memetakan masalah ekonomi seperti penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga berhasil memetakan persamalah sosial. Setelah sekian lama pemerintah kolonial hanya berasumsi bahwa kondisi penduduk bumiputra baik-baik saja, melalui survei yang

¹¹ D. G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Tweede Druk* (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921), hlm 754.

¹² C. Fasseur, *Ethical Policy And Economic Development: Some Experiences of the Colonial Past.* *Lembaran Sejarah* Vol. 3 No. 1, 2001, hlm. 218.

¹³ *Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera*, Vol. Xa, hlm. 30.

dilakukan Mindere Welvaart ditemukan fakta bahwa masalah ketidaksejahteraan di Hindia-Belanda merupakan masalah yang serius.

Beberapa Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Hindia Belanda

Dalam 12 bulan penyelidikan, *Mindere Welvaart Commissie* setidaknya menemukan tiga masalah utama menyangkut kesejahteraan penduduk bumiputra, yaitu penghasilan masyarakat Hindia Belanda yang dibawah rata-rata, kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah dan sektor, dan akses pendidikan yang terbatas pada kalangan atas. Adapun penjelasan ketiga aspek permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Rendahnya Penghasilan

Menurut laporan komisi, mayoritas penduduk Jawa berprofesi sebagai petani. Tingkat kesuburan tanah di Jawa yang tinggi menjadi alasan mengapa banyak penduduk berprofesi sebagai petani. Survei ini sejalan dengan data sensus penduduk Hindia Belanda¹⁴ yang menyatakan bahwa pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk. Sekitar 60% penduduk bumiputra berprofesi sebagai petani. Sementara golongan Eropa dan Cina lebih banyak bekerja di sektor industri dan perdagangan.

Meskipun penduduk bumiputra banyak berprofesi sebagai petani, bukan berarti kebutuhan pangan mereka selalu terpenuhi. Masalah kelangkaan pangan yang terjadi pada abad ke-19, ternyata terus berlanjut pada abad ke-20. Geertz, mencatat bahwa sejak abad ke-19 banyak lahan subur padi dialihfungsikan menjadi area penanaman tebu.

Tabel 1. Pertumbuhan lahan sawah dan tegalan di Jawa selama 20 tahun (per bau)

Jenis Lahan	Tahun	
	1883	1903
Sawah	2.600.000	2.800.000
Tegalan	900.000	1.400.000
Total	3.500.000	4.200.000

Sumber: Mindere Welvaart Onderzoek Va, hlm. 53-55.

Realitas ini diamini oleh laporan Komisi Kesejahteraan yang menyebutkan selama 20 tahun terakhir lahan persawahan hanya tumbuh tidak lebih dari 8 %. Minimnya lahan subur padi pada

¹⁴ *Volkstelling 1930*, Departement van Economische Zaken. Batavia: Landsdrukkerij.

akhirnya diikuti penurunan produksi padi baik secara kuantitas dan kualitas. Sementara itu pertumbuhan lahan kering atau tegalan untuk perkebunan melejit 55%. Komisi Kesejahteraan berkelit proporsi yang tidak seimbang antara sawah dan tegalan disebabkan oleh sulitnya mendapatkan sumber air untuk membuka lahan persawahan baru.

Selain karena makin berkurangnya lahan pertanian subsisten, pertumbuhan populasi yang tinggi juga menjadi faktor lain.

Tabel 2. Komposisi Populasi Penduduk Jawa tahun 1850 dan 1905

Tahun	Populasi			Total
	Bumiputra	Timur Asing	Eropa	
1850	9.420.553	147.168	16.409	9.584.130
1905	29.715.908	317.183	64.917	30.098.008

Sumber: Koloniaal Verslag 1907, appendix A.

Dalam waktu hanya setengah abad, populasi penduduk di Jawa bertambah lebih dari 100%. Penduduk bumiputra menjadi golongan yang mengalami kenaikan paling signifikan dibanding golongan lain. W.R. Hugenholtz¹⁵ berpendapat minimnya ketersediaan lahan subur untuk padi yang turut diikuti oleh pertumbuhan pesat penduduk, menyebabkan tanah yang tersedia untuk menanam padi yang notabene sebagai makanan pokok penduduk semakin sedikit.

Kelangkaan pangan pada awal abad ke-20 sebenarnya telah diprediksi sejak tahun 1897. Kala itu Gubernur Jenderal telah memerintahkan kepada para kepala daerah melalui surat edaran, supaya meminta petani padi untuk menanam padi lebih awal saat hujan pertama turun. Selain itu, para petani juga diinstruksikan untuk menanam lahan pekarangan mereka dengan padi dan menyimpan sebagian hasil panen mereka sebagai cadangan pangan.¹⁶ Namun himbauan itu tampaknya kurang berhasil, sehingga kelangkaan pangan tetap terjadi pada abad berikutnya.

Kelangkaan pangan yang terjadi turut menyebabkan meroketnya harga beras pada awal abad ke-20. Dikutip dari Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia, harga beras secara berangsur mengalami kenaikan cukup tinggi. Dalam waktu dua puluh tahun, harga beras di Jawa meningkat lebih dari seratus persen.

¹⁵ W.R. Hugenholtz, "Famine and Food Supply in Java 1830-1914", dalam Bayly, C.A dan Kolff, D.H., Ed., *Two Colonial Empires. Comparative Studies in Overseas History* (Dordrecht: Springer Netherlands, 1986), hlm. 156.

¹⁶ *Bataviaasch Nieuwsblad*, 23 Februari 1901.

Tabel 3. Indeks Harga Beras di Jawa pada Awal Abad ke-20 (f/Kwintal)

Tahun	1900	1905	1908	1911	1917	1919	1920
Indeks Harga	70,1	72,7	92,0	94,9	109,5	147,9	228,2

Sumber: Pieter Creutzberg dan J. T. M. van Lannen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 125.

Naiknya harga beras tentunya semakin menyulitkan penduduk Jawa, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari solusi untuk mengatasinya. Bahan pangan alternatif pun mulai dipertimbangkan penduduk untuk mengatasi kekurangan beras, seperti yang terlihat di tabel 3 di bawah ini.

Tabel 4. Bahan pangan nabati yang dikonsumsi tiap keluarga (dalam kilogram)

Jenis	Tahun					
	1913	1916-1924	1930	1931	1932	1933
Padi	102	96	89	86	86	86
Jagung	29	38	45	41	40	46
Singkong	71	134	116	127	132	125

Sumber: Pieter Creutzberg dan J. T. M. van Lannen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, hlm. 47.

Untuk mengatasi harga beras yang melambung tinggi, penduduk memilih mengalihkan bahan makanan pokok mereka ke jagung dan ketela, yang sekaligus mengakibatkan konsumsi beras menurun. Jagung dan ketela dipilih karena memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan beras. Dari data statistik di tabel 3 pun terlihat bahwa dari tahun ke tahun, konsumsi bahan pangan alternatif mengalami peningkatan. Pemerintah kolonial memang melakukan impor beras dari luar negeri, tetapi jumlah impor beras tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan.¹⁷

Selain harga beras yang tidak terjangkau, daya beli rendah turut mempengaruhi asupan nutrisi penduduk. Menurut hasil investasi komisi Mindere Welvaart, konsumsi daging pada awal abad ke-20 mengalami penurunan. Ada kalanya daging masih dikonsumsi, tetapi hanya

¹⁷ Elsbeth Locher-Scholten, *Etika yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877-1942* (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 122-123.

disajikan pada upacara-upacara hari besar tertentu. Sebagai alternatifnya, penduduk mulai beralih pada ikan yang kala itu dianggap lebih murah dibandingkan daging.¹⁸

Saat lahan pertanian tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, mereka mulai beralih ke sektor lain seperti industri. Kendati demikian, tidak banyak kesempatan untuk bekerja di sektor luar pertanian diambil. Berdasarkan laporan komisi *Mindere Welvaart*, penduduk hanya mau meninggalkan wilayah asal mereka apabila wilayah tersebut sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, seringkali untuk menghindari pajak, kewajiban, atau alasan pribadi lainnya.¹⁹ Data yang disampaikan komisi ini sejalan dengan analisis Wertheim²⁰ yang menyatakan bahwa tumbuhnya aktivitas industri di Hindia-Belanda dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan kemiskinan dan berkurangnya kesempatan untuk memperoleh uang dari pertanian.

Kurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan dan uang, menyebabkan pendapatan penduduk bumiputra lebih sedikit dibandingkan golongan lain. Dalam catatan statistik tahun 1921, rata-rata penghasilan penduduk bumiputra hanya sekitar 80 gulden, sedangkan golongan Eropa memperoleh pendapatan rata-rata 2.300 gulden dan golongan Timur Asing memiliki pendapatan rata-rata 250 gulden.

Tabel 5. Pendapatan per kepala keluarga Hindia-Belanda tahun 1930 (dalam f/gulden)

Bumiputra			Eropa			Timur Jauh		
Jawa dan Madura	Luar Jawa	Hindia-Belanda	Jawa dan Madura	Luar Jawa	Hindia-Belanda	Jawa dan Madura	Luar Jawa	Hindia-Belanda
55	66	59	2.400	3.200	2.500	310	320	310

Sumber: W. M. F. Mansvelt dan P. Creutzberg, *Changing Economy in Indonesia A Selection of Statistical Source Material from the early 19th Century up to 1940, Volume 5 National Income* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 77.

Pada tahun-tahun berikutnya, pendapatan penduduk bumiputra di Jawa terus mengalami kemerosotan hingga hanya memperoleh 55 gulden, sementara tren pendapatan golongan lain terus mengalami kenaikan hingga krisis malaise terjadi. Kelompok Eropa yang tadinya

¹⁸ Mindere Welvaart Onderzoek, IXa, hlm. 77

¹⁹ Mindere Welvaart Onderzoek, IXa, hlm. 102-103.

²⁰ W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* (The Hague: W. Van Hoeve, 1956), hlm. 109-110.

memiliki pendapatan rata-rata 2.300 gulden menjadi 2.400 gulden, sedangkan Timur Jauh pendapatannya naik menjadi 310.

Rendahnya penghasilan dan kelangkaan pangan merupakan kombinasi yang mematikan di dalam masyarakat. Menurut laporan van Kol, kelaparan memaksa penduduk mencari jalan pintas untuk bertahan hidup. Memasuki abad baru, tindakan kriminalitas mengalami peningkatan cukup tajam. Perampokan menjadi hal yang biasa kala itu. Mereka tidak hanya mencuri bahan pangan, tetapi juga mencuri ternak dan tidak segan melakukan pembunuhan. Tercatat antara tahun 1899-1901, kasus pencurian ternak meningkat dari 36 kasus menjadi 115 kasus, sedangkan kasus pembunuhan melonjak dari 7 kasus menjadi 111 kasus (Van Kol, 1903: 663).²¹ Celakanya, perampokan yang terjadi bukan dilakukan oleh individu tetapi secara berkelompok, dengan kata lain kondisi paceklik turut mendorong lahirnya sindikat perampok/bandit.

2. Fasilitas Kesehatan Kurang Layak

Menurut survei yang dilakukan *Mindere Welvaart Commissie* (MWC), kondisi kesehatan di Jawa secara umum dianggap memuaskan. Sistem kesehatan yang sebelumnya kacau karena pemisahan yang tidak tuntas antara jawatan kesehatan militer dan jawatan kesehatan sipil dapat teratasi pada 1911. Kendati demikian, laporan *Mindere Welvaart Commissie* seringkali tidak sesuai realitas lapangan. MWC sering melaporkan bahwa kondisi penduduk bumiputra baik-baik saja, tanpa ada masalah berarti. Ketidakakuratan laporan tersebut menyebabkan jurnalis bumiputra Mas Marco Kartodikromo melontarkan kritik keras terhadap komisi ini melalui artikelnya berjudul *Marco: Pro of Contra Dr. Rinkes* yang terbit di majalah Sarotomo edisi ke-10 No.142 1914.²²

Di lapangan, penduduk bumiputra kesulitan memperoleh akses kesehatan Barat karena dianggap mahal dan sejak awal pendiriannya memang eksklusif diperuntukkan untuk orang Eropa. Pada akhirnya penduduk lebih memilih pengobatan tradisional yang mengandalkan dukun dan ramuannya²³. Masalah kemiskinan menjadi faktor paling umum mengapa

²¹ Van Kol. *Uit Onze Kolonien* (Leiden: A. W. Sijthoff, 1903), hlm. 663.

²² Takashi Shiraishi, *Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 112-113

²³ Ramuan dukun terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ramuan herbal itu terkadang diberi nama asing yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tujuannya untuk menjaga kerahasiaan pengetahuan atau takut penggunaan nama umum bisa mengurangi khasiat. Theodore G.Th. Pigeaud, *Literature of Java: Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the*

masyarakat tidak dapat mengakses pengobatan di rumah sakit. Berdasarkan penuturan J. H. F. Kohlbrugge, dokter sipil yang bertugas di Sidoarjo, biaya pengobatan pada masa politik etis masih sangat mahal.

Tabel 6. Biaya Pengobatan di Hindia Belanda

Pengobatan	Tarif
Visit	f 2,50
Visit malam hari	f 10
Konsultasi	f 25
Persalinan	f 50
Operasi	f 100

Sumber: J. H. F. Kohlbrugge, “De particuliere geneesheer”, dalam *De Indische Mercur*, 25 Mei 1917.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya pengobatan kepada dokter Eropa terbilang mahal. Untuk konsultasi, biaya yang dibutuhkan separuh dari total pendapatan tahunan penduduk bumiputra yang rata-rata hanya f50-80. Mahalnya biaya pengobatan saat itu karena kurangnya perhatian pemerintah kolonial dalam menyediakan alat medis dan obat-obatan, sehingga dokter seringkali harus membelinya dengan uang sendiri.²⁴ Menurut data yang dihimpun van Doorn, alokasi dana untuk jawatan kesehatan sipil merupakan yang paling kecil dibandingkan proyek lainnya.

Tabel 7. Anggaran Belanja Pemerintah Hindia-Belanda (dalam f 1.000)

Sektor	Tahun			Total
	1904	1909	1914	
Pegawai pemerintah	11.907	12.336	12.634	129.887
Proyek pembangunan	11.537	13.778	26.026	171.582
Pertanian	807	1.208	2.138	13.540
Pendidikan	4,906	8.306	13.116	90.301
Jawatan Kesehatan Sipil	3.145	3.502	7.544	50.864

Library of the University of Leiden and Other public Collections in the Netherlands: Vol 1: Synopsis of Javanese Literature 900-1900 (Gravenhage: Nijhoff, 1967), hlm. 265.

²⁴ J. H. F. Kohlbrugge, “De particuliere geneesheer”, dalam *De Indische Mercur*, 25 Mei 1917.

Sumber: J.A.A. van Doorn, *De Laatste Eeuw van Indie : Ontwikkeling en Ondergang van een Koloniaal Project* (Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 1994), hlm. 147.

Masalah semakin pelik karena petugas kesehatan yang tersedia di Hindia-Belanda masih sangat terbatas. Untuk dokter bahkan tidak sampai 1000 orang, padahal jumlah penduduk di Hindia-Belanda telah mencapai 30 juta orang pada tahun 1905. Sekolah dokter Jawa memang telah didirikan, tetapi mereka hanya dianggap sebagai asisten dari dokter Eropa, karena itu mereka belum memiliki wewenang layaknya dokter Eropa.

Tabel 8. Jumlah Personil Kesehatan tahun 1900

Jenis profesi kesehatan	Personil
Dukun	33.000
Dokter Cina (Sinse)	241
Dokter Eropa	88
Apoteker	20
Dokter gigi	8
Bidan Eropa	34
Bidan Lokal	42
Dokter Jawa	90

Sumber: Koloniaal Verslag 1901, Appendix T.

Minimnya dokter yang tersedia di Hindia-Belanda menjadi masalah tersendiri saat berbagai epidemi muncul pada akhir abad ke-19 dan 20. Penyakit seperti malaria, trakoma, cacangan, dan rematik masih menjadi penyakit paling umum di Hindia-Belanda. Untuk berobat penduduk bumiputra lebih suka dirawat oleh dukun yang mengandalkan obat-obatan herbal daripada dirawat oleh dokter Eropa atau Jawa.²⁵

Selain minimnya petugas kesehatan yang tersedia, fasilitas poliklinik dan rumah sakit pemerintah yang seadanya juga menjadi pertimbangan lain mengapa penduduk lebih memilih pengobatan dukun. Sering kali rumah sakit terletak jauh dari pemukiman penduduk desa, sehingga untuk menuju ke sana membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Mereka juga khawatir tidak dapat melaksanakan pemakaman sesuai dengan agama yang dianut apabila meninggal di rumah sakit. Sementara bagi golongan mampu, fasilitas yang disediakan rumah sakit tidak

²⁵ Mindere Welvaart Onderzoek, IXa, hlm. 89.

cukup nyaman. Rumah sakit kala itu bisa dibilang memprihatinkan, dindingnya hanya terbuat dari bambu yang sering kali dimakan oleh rayap, pencahayaan kurang, dan dipenuhi tanda merah bekas ludah sirih (Hesselink, 2015: 146).²⁶ Oleh sebab itu, mereka lebih nyaman dirawat di rumah sakit yang dikelola oleh misionaris, lantaran dianggap lebih lengkap dan dikelola dengan baik (Mindere Welvaart Onderzoek IXa: 91-93).

3. Akses Pendidikan yang Terbatas

Pendidikan merupakan investasi untuk kemajuan, hadirnya tenaga kerja terampil dan murah merupakan impian setiap pemerintah kolonial. Sejak paruh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Hindia Belanda mengalami kekurangan sumberdaya manusia. Tidak banyak pekerja Eropa berpendidikan tinggi mau mengisi posisi di pemerintahan dengan gaji kecil. Sebagai solusi pemerintah kolonial mulai melirik penduduk bumiputra untuk menduduki posisi ini.²⁷ Meskipun pada awalnya penduduk bumiputra terdidik dikhawatirkan dapat mengganggu hegemoni pemerintah kolonial, namun ketakutan ini disiasati dengan melakukan segregasi di bidang pendidikan. Praktek ini kemudian menjadi ciri pendidikan masa kolonial yang terus bertahan hingga masa politik etis.

Menurut laporan Mindere Welvaart Commission, hampir seluruh sekolah baik di kota atau pedalaman mengalami perkembangan pesat.²⁸ Politik etis merangsang munculnya sekolah-sekolah di berbagai tempat Hindia-Belanda, bahkan sekolah merambah hingga ke wilayah pedesaan. Sebuah situasi yang belum terjadi sebelumnya. Sayangnya, sekolah-sekolah ini juga menghadapi berbagai kendala. Investigasi yang dilakukan *Mindere Welvaart Commission* menunjukkan bahwa kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan masih kurang. Di beberapa daerah, para orang tua menganggap sekolah kurang bermanfaat karena tidak bisa menjamin posisi yang lebih tinggi bagi penduduk bumiputra. Kondisi ini lantas diperparah oleh subsidi yang rendah, bahan ajar seadanya, jumlah guru yang tidak mencukupi dan kompetensi guru yang seadanya. Di wilayah Caringin Jawa Barat, banyak orang tua enggan mengirimkan anaknya ke sekolah, karena menganggap pendidikan yang diterima di sekolah hanya membuat anak mereka tidak mau bekerja kasar. Sementara di daerah Pekalongan dan

²⁶ L. Hesselink. "The Early Years of Nursing in the Dutch East Indies, 1895–1920," in *Colonial Caring: A History of Colonial and Post-colonial Nursing*, Manchester: Manchester University Press, 2015, hlm. 146.

²⁷ Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Op. Cit, hlm. 251.

²⁸ Mindere Welvaart Onderzoek IXa, hlm. 242.

Anyer banyak sekolah ditutup karena banyak orang tua lebih menyukai pendidikan agama bagi anak-anaknya.²⁹

Namun, dibandingkan realitas di atas, kondisi yang lebih memprihatinkan dialami oleh para perempuan di Hindia-Belanda. Jumlah perempuan yang dapat mengakses pendidikan sangatlah sedikit. Hingga tahun 1905 kehadiran perempuan di sekolah masih begitu rendah. Kondisi ini terjadi karena masih banyak penduduk yang menganggap keikutsertaan perempuan di sekolah tidak perlu, tidak efisien dan tidak pantas. Bahkan di beberapa daerah muncul pemikiran bahwa keikutsertaan perempuan dalam pendidikan dapat membahayakan pernikahannya kelak. Banyak pria tidak ingin perempuan memiliki pendidikan lebih tinggi darinya, karena menurut pandangan mereka tugas perempuan hanya di dapur, sehingga tidak diperlukan pendidikan tinggi. Kendati demikian, di beberapa sekolah misionaris yang didominasi oleh staf perempuan dan kurikulum yang sesuai dengan minat perempuan, ternyata mampu menarik minat banyak murid.³⁰ Realitas ini menunjukkan masih kuatnya ketimpangan gender di sekolah-sekolah pemerintah, sehingga banyak perempuan merasa tidak nyaman atau tidak memperoleh dukungan untuk memasukinya.

Direktur Dinas Pendidikan J. H. Abendanon menjadi tokoh yang paling ambisius dalam melakukan perubahan di bidang pendidikan. Ia berambisi mentransformasikan bangsawan tradisional menjadi elit baru berpendidikan Barat. Sayangnya, Abendanon mendapati kenyataan bahwa hanya sedikit penduduk bumiputra yang dapat berbahasa Belanda, untuk itu ia membuat proposal untuk memperkenalkan bahasa Belanda melalui pusat kursus bahasa Belanda.³¹ Tentu banyak keuntungan yang dapat diraih apabila ide itu dapat terealisasi, selain dapat memotong biaya administrasi gaji pegawai, penempatan kalangan bumiputra di pemerintahan juga dapat menginspirasi penduduk bumiputra lainnya. Selain pendirian kursus bahasa, ia juga membuat gebrakan dengan munculnya wacana pendirian sekolah untuk perempuan bumiputra. Keinginannya ini muncul setelah beberapa kali melakukan korespondensi dengan Raden Ajeng Kartini.³²

²⁹ Mindere Welvaart Onderzoek IXa, hlm. 243-244.

³⁰ Mindere Welvaart Onderzoek IXa, hlm. 247.

³¹ I. J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie* (Batavia: J.B. Wolters, 1939), hlm. 292.

³² Raden Adjeng Kartini, *Letters of a Javanese Princess*, [Terj.] Agnes Louise Symmers (London: Duckworth & Co., 1920), hlm. 36-37.

Sayangnya ide yang dicetuskan oleh Abendanon mendapat penolakan dari Menteri Jajahan Idenburg (1902-1905). Ia menganggap gagasan Kepala Dinas Pendidikan itu hanya akan menghamburkan anggaran pendidikan yang terbatas. Pandangan Abendanon dianggap terlalu maju dari zamannya, sehingga masa jabatannya pun tidak bertahan lama, pada tahun 1904 ia digantikan oleh J. G. Pott. Sesuai dengan arahan Idenburg dan gubernur jenderal yang baru J. B. van Heutsz, pada masanya kebijakan pendidikan lebih difokuskan pada pendirian sekolah teknik. Terdapat dua jenis sekolah teknik, pertama *Ambachtsschool* terbuka hanya untuk lulusan ELS. Sekolah ini dianggap sebagai sekolah teknik yang sesungguhnya. Kedua, *Ambachtsleergang/Balai Latihan*, yang muridnya berasal dari Sekolah Dasar Kelas Dua yang memiliki kurikulum lebih rendah dibandingkan sekolah teknik pertama.³³

Kesenjangan masih terlihat jelas pada masa politik etis ini. Tidak hanya di sekolah teknik, di sekolah dasar pun kesenjangan tidak banyak berubah dibandingkan abad sebelumnya. Dalam surat Kartini ke sahabat penanya Stella Zeehandelaar, ia mengeluhkan bagaimana ketimpangan terjadi di sekolah dasar di Jawa.

Dan sekarang tentang orang-orangnya, tentang penduduk Jawa pada umumnya. Orang Jawa adalah anak-anak yang sudah dewasa. Apa yang telah dilakukan Pemerintah untuk mendorong perkembangan mereka? Untuk anak-anak bangsawan, ada yang disebut Sekolah Tinggi, Sekolah Menengah, dan Sekolah Doktor-djawa; dan untuk rakyat, ada berbagai sekolah rakyat, satu di tiap-tiap kabupaten. Meskipun Pemerintah membagi sekolah rakyat ke dalam dua kelas. Kelas pertama, yang terdiri dari sekolah-sekolah yang terletak di ibukota propinsi, diselenggarakan seperti sebelum pemisahan, tetapi di sekolah-sekolah kelas dua, anak-anak hanya belajar bahasa Jawa, membaca, menulis, dan sedikit berhitung. Tidak ada bahasa Melayu yang diajarkan seperti sebelumnya, mengapa, tidak dijelaskan. Pemerintah percaya, menurut pikiran saya, bahwa jika rakyat dididik, mereka tidak akan mau lagi menggarap tanah (Kartini, 1920: 36-37).

Di dalam suratnya itu Kartini mempertanyakan apa yang dilakukan pemerintah kolonial untuk perkembangan pendidikan penduduk secara umum. Untuk kalangan atas, mereka memang dapat menikmati sekolah yang standarnya di atas rata-rata mulai *Europesche Lager School* (ELS), *Hollandsche Inlandsche School* (HIS), *Hoogere Burger School* (HBS), hingga

³³ Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas), hlm. 225.

STOVIA. Namun untuk kalangan ekonomi lebih bawah, mereka hanya dapat menikmati Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua.

Sekolah Kelas Satu biasanya diisi oleh anak-anak pejabat tinggi dan pegawai negeri sipil bumiputra. Sementara Sekolah Kelas Dua diisi oleh anak-anak kepala desa dan pedagang, pengrajin dan petani. Namun di antara dua sekolah untuk bumiputra ini ketimpangan masih jelas terlihat. Di Sekolah Kelas Dua yang berisi kalangan menengah ke bawah, anak-anak hanya diajarkan membaca dan menulis bahasa Jawa. Mereka tidak diajarkan bahasa melayu layaknya Sekolah Kelas Satu. Kartini menduga hal ini terjadi karena pemerintah kolonial khawatir penduduk bumiputra tidak akan mau menggarap lahan.

Meskipun Sekolah Kelas Dua pada awalnya diproyeksikan menjadi sekolah untuk kalangan menengah ke bawah bumiputra, ternyata masih banyak penduduk yang tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, J. B. van Heutsz memutuskan untuk mendirikan *Volkschool* (Sekolah Desa) pada 1907.³⁴ Pendirian Sekolah Desa di sisi lain menunjukkan ketidakmampuan pemerintah kolonial untuk menyelenggarakan pendidikan secara merata, karena di Sekolah Desa penyelenggaraannya tergantung kemampuan penduduk. Pelajaran yang diberikan pun hanya ala kadarnya, sementara waktu untuk bersekolah pun jauh lebih singkat dari sekolah lainnya, yakni hanya tiga tahun.

KESIMPULAN

Kemunculan Mindere Welvaart tidak dapat dipungkiri terkait erat dengan program politik etis yang sedang digiatkan oleh pemerintah kolonial pada awal abad ke-20. Tatkala suara-suara yang menyerukan perbaikan nasib penduduk bumiputra tidak dapat dibendung lagi, mau tidak mau memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan. Dalam waktu singkat, sebuah komisi untuk menyelidiki tingkat kesejahteraan penduduk bumiputra pun dibentuk. Komisi ini diharapkan dapat menghimpun data kondisi yang sebenarnya di lapangan. Pada awal pembentukan Mindere Welvaart Commisie banyak menuai kontroversi. Sebagian ahli menganggap pembentukan komisi ini hanya cara pemerintah kolonial mengulur waktu untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk. Sementara sebagai lainnya memandang proyek ini hanya akan membuang anggaran dan waktu. Pada kenyataannya antusiasme untuk melakukan

³⁴ P. L. Geschiere, "The Education Issue in the Dutch East Indies in the Twentieth Century Opinions on the Question of 'Western Education' versus 'National Education'", dalam *Acta Historiae Neerlandicae/Studies on the History of the Netherlands VI* (Dordrecht: Springer, 1973), hlm. 150-151.

investigasi tersebut memang kurang, baik dari pemerintah kolonial atau pegawai yang ditugaskan.

Terlepas dari kritik yang menyertainya, proyek investigasi tetap dilanjutkan hingga selesai. Penelitian ini merupakan penelitian masif yang menyasar hampir seluruh wilayah di Jawa dan Madura, sehingga membutuhkan waktu lama. Untuk menyelesaikan penerbitan seluruh laporan penyelidikan dibutuhkan waktu sepuluh tahun. Lamanya waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan penerbitan, ternyata menimbulkan keraguan mengenai keaktualan data yang disampaikan. Meskipun demikian, laporan ini memuat banyak data penting, karena laporan tidak hanya memetakan permasalahan ekonomi tetapi juga permasalahan sosial penduduk. Setelah selama ini, Pemerintah hindia Belanda selalu menyangkal permasalahan kesejahteraan penduduk, hasil survei yang dilakukan oleh Mindere Welvaart Commisie menunjukkan data yang sebaliknya. Banyak permasalahan mendasar terjadi di Hindia Belanda, mulai dari rendahnya penghasilan, masalah kesehatan, hingga terbatasnya akses pendidikan. Seluruh masalah ini bukanlah masalah baru di tanah koloni, melainkan sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

REFERENSI

- Bataviaasch Nieuwsblad*. “Vervolg der geschiedenis van den Resident die niet tegen zijn verantwoordelijkheid opgewassen is.”, 23 Februari 1901.
- Boeke, J.H.. “De Etische richting in de Nederlandsch-Indische politiek”, dalam *De Gids*, 1940.
- Brugmans, I. J. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Batavia: J.B. Wolters, 1939.
- Creutzberg. P & Van Lannen, J.T.M. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- De Zwaan, K.. “Gebruiken bij ziekten der inlanders van onzen Oost en hun ethnologische beteekenis.” *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde*, Vol. 20, 1916.
- Departement van Economische Zaken, *Volkstelling 1930*. Batavia: Landsdrukkerij, 1931.
- Fasseur, C. “Ethical Policy and Economic Development: Some Experiences of the Colonial Past”, dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 3 No. 1, 2001.

- Furnivall, J.S. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Geertz, C. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press, 1963.
- Geschiere, P. L. “The Education Issue in the Dutch East Indies in the Twentieth Century Opinions on the Question of ‘Western Education’ versus ‘National Education,’” in *Acta Historiae Neerlandicae/Studies on the History of the Netherlands VI*. Dordrecht: Springer, 1973.
- Hesselink, L. “The Early Years of Nursing in the Dutch East Indies, 1895–1920,” dalam *Colonial Caring: A History of Colonial and Post-colonial Nursing*, Manchester: Manchester University Press, 2015.
- Kartini, R. A. *Letters of a Javanese Princess*, [Terj.] Agnes Louise Symmers. London: Duckworth & Co, 1920.
- Kohlbrugge, J. H. F. *De Indische Mercur*. “De particuliere geneesheer”, 1917.
- Koloniaal Verslag (1849-1931)*. 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1931.
- Kuyper, A. *Eenige Kameradviezen Uit de Jaren 1874 En 1875*. Amsterdam: J. A. Wormser, 1890.
- Locher-Scholten, E. *Etika yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877-1942*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Mansvelt, W.M.F. & Creutzberg, P. *Changing Economy in Indonesia A Selection of Statistical Source Material from the early 19th Century up to 1940, Vol. 5 National Income*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.
- Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Va
Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. IXa
Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Xa
Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Xc
- Pigeaud, T.G.T. *Literature of Java: Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other public Collections in the Netherlands: Vol 1: Synopsis of Javanese Literature 900-1900*. Gravenhage: Nijhoff, 1967.

Prince, G.H.A. “Kebijakan Ekonomi di Indonesia, 1900-1942”, dalam J. T. Linbald (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2000.

Shiraishi, T. *Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Simbolon, P. T. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2006.

Steinmetz, H. E. *Over de opleiding tot controleur bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië*, 1889.

Stibbe, D. G. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Tweede Druk*. Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921.

Van der Does, L. P. “Sociaal onderzoek in Indonesië.” *Mens en Maatschappij*, Vol. 23, 1948.

Van Deventer, C.T. “Een Eereschuld” in *De gids: nieuwe vaderlandsche letteroefeningen*, Volume 63. Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1899.

Van Doorn, J.A.A. *De Laatste Eeuw van Indie : Ontwikkeling en Ondergang van een Koloniaal Project*. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1994.

Van Kol, H. *Ontwerp-Program voor de Nederlandsche Koloniale Politiek*. Amsterdam: Uitgever J. A. Fortuijn, 1901.

Van Kol, H. *Uit Onze Kolonien*. Leiden: A. W. Sijthoff, 1903.

Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. The Hague: W. Van Hoeve, 1956.